

PERHUTANAN SOSIAL : SATU TINJAUAN
DARI PERSPEKTIF PENGEMBANGAN LEMBAGA

oleh :

Amri Marzali*)

PENDAHULUAN

Pendekatan "Pengembangan Lembaga"

Melihat Perhutanan Sosial (PS) dari perspektif "Pengembangan Lembaga" berarti menerima dua prinsip baru.

Pertama, PS harus dipandang sebagai sebuah organisasi formal yang sengaja dibangun untuk melaksanakan perubahan sosial yang direncanakan, yaitu mengubah pola-pola hubungan segitiga : masyarakat desa, hutan dan petugas kehutanan yang ada selama ini, dan memperkenalkan pola-pola hubungan yang baru (lihat model yang dilampirkan).

Kedua, melalui peranserta masyarakat desa dan dukungan berbagai pihak, organisasi PS didorong dan dibina agar tumbuh baik dan melembaga, artinya pola-pola hubungan segitiga baru yang diperkenalkan melalui program PS diusahakan menjadi mapan.

Prinsip dan model yang saya gambarkan diatas merupakan penafsiran dari perspektif "Pengembangan Lembaga" yang dikampanyekan Esman dkk (Esman dan Balaise, 1966; Esman 1967; Woods et al, 1972; Uphoff, 1985) pada dekade 1960-an dan awal 1970-an.

"Pengembangan lembaga" menurut definisi Esman adalah :

- a. Merencanakan, menyusun dan membimbing organisasi-organisasi formal yang baru atau organisasi-organisasi lama yang dibentuk baru,
- b. Organisasi-organisasi ini mengandung perubahan dalam nilai dan teknologi sosial/fisikal,
- c. Organisasi-organisasi ini bertugas membangun, melancarkan, melindungi pola hubungan normatif dan pola tindakan,
- d. Organisasi-organisasi ini mengusahakan dukungan dan penyempurnaan di dalam lingkungan masyarakat.

Masalah dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari satu penelitian antropologis terhadap masyarakat petani Sunda di Cianjur (Brokensha 1984 ; dan Murray 1987). Penelitian ini dilaksanakan sepanjang tahun 1989 di kecamatan Cikalong Kulon. Proses PS yang saya teliti adalah kawasan Kiara Payung yang berbatasan dengan Desa Lembahsari dan Cirameuwah Girang (Manurung, 1989).

*) Mahasiswa S₃ Boston University dan Dosen Antropologi U.I.

Dalam kajian ini saya akan memusatkan perhatian pada aspek sosial dari PS, khususnya dalam hal "Peranserta masyarakat" dan "proses Pelembagaan" (Institutionalization). Pernyataan pokok saya dalam penelitian ini adalah :

- a. Seberapa jauh peluang berperanserta dalam proyek PS diberikan kepada masyarakat ?
- b. Seberapa jauh PS, sebagai sebuah organisasi formal, telah melembaga (Institutionalized).

Kedua butir ini adalah aspek-aspek PS yang paling relevan kalau ditinjau dari prespektif "Pengembangan Lembaga".

"Peranserta" dapat diacukan kepada berbagai tahap program, berbagai kegiatan dalam satu proyek, dan berbagai level administratif dari satu organisasi (Thorsen, 1986). Apakah peranserta masyarakat perlu dan relevan pada setiap level administratif Perum Perhutani: dari level Direksi, Unit, Administratur, KPH, sampai RPH ? Apakah peranserta masyarakat perlu dan relevan dalam setiap tahap-administratif program: dari merancang, mengambil keputusan, melaksanakan dan evaluasi proyek ? Apakah peranserta masyarakat perlu dan relevan dalam setiap kegiatan pelaksanaan proyek: dari memilih petak lahan, membagi lahan untuk masing-masing individu, membersihkan lahan, mengolah lahan sampai menjaga lahan dari berbagai gangguan ? Apakah peranserta masyarakat perlu dan relevan dalam memperoleh keuntungan dari seluruh hasil hutan: dari tanaman padi, palawija, buah-buahan sampai tanaman pokok ? Hal ini akan dibahas dalam makalah ini.

Dalam aspek pelembagaan, saya akan memperhatikan dua hal yang menjadi dasar dari proses ini, yaitu "legitimasi" para pemimpin dan staf pelaksana proyek PS (cq petugas Perum Perhutani) dan "efektifitas" dari proyek (Uphoff dan Esman, 1974). Legitimasi akan diperoleh apabila telah tumbuh kepercayaan masyarakat bahwa PS dan para pemimpinnya betul-betul melayani kepentingan mereka. Sampai seberapa jauh situasi ini terlihat di lapangan ? Efektifnya PS akan tercapai kalau proyek ini memang memperbaiki kesejahteraan pesanggem. Jadi bukti-bukti dari langkah-langkah yang diambil untuk menjamin "legitimasi" dan "efektifitas" dari PS menjadi dasar dari "pelembagaan" PS, dan sekaligus menjadi dasar dari kelanjutan "peranserta" masyarakat. Semua hal ini akan dibahas dalam makalah ini secara ringkas.

Metode dan Teknik Penelitian

Dalam mengumpulkan data, saya mengkombinasikan teknik kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif terdiri dari 5 jenis kuesioner :

- a. Sensus 1100 KK Desa Lembahsari
- b. Kuesioner tentang masalah umum, 161 reponden,
- c. Kuesioner tentang pola pertanian sawah tadah hujan, 41 reponden,

- d. kuestioner tentang pola pertanian di huma, 51 responden,
- e. kuestioner tentang PS 40 responden.

Kuestioner ini disebarakan kepada seluruh penduduk kampung Ci-jambe (Rt 10 dan 11) Ciramaeuwah Girang.

Metode kualitatif terdiri dari : observasi, partisipasi, depth interview, open interview, self record, karangan riwayat hidup sendiri. Analisa dilakukan dengan cara membandingkan dan saling melengkapi antara : hasil kuestioner, hasil teknik kwantitatif dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai pihak dan instansi. Penelitian ini lebih bersifat eksploratif dan deskriptif. Analisa dilakukan secara induktif untuk mencapai satu pengertian mengenai ciri-ciri umum "peranserta" masyarakat dan pelebagaan" PS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Organisasi Kelompok Tani Hutan

Dari buku P3S 1989 dan P4S khusus Bab 3 halaman 3, kita dapat menyimpulkan bahwa ketelibatan masyarakat baru terjadi pada level proyek PS di suatu kawasan RPH tertentu. Dua kegiatan pokok yang dilakukan petugas Perum Perhutani di sana yang melibatkan petani hutan adalah :

- a. Membentuk Organisasi Kelompok Tani Hutan (KTH), melalui :
 - pencarian pemrakarsa
 - inventarisasi calon anggota KTH
 - seleksi calon anggota KTH
 - pembentukan organisasi KTH
 - penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry
- b. Membina Organisasi KTH, Petugas Perum Perhutani, dengan melibatkan instansi-instansi terkait, melakukan :
 - penyuluhan
 - bimbingan
 - konsultasi
 - latihan terhadap KTH

Bagaimana kenyataan yang terlibat di lapangan ? Keterlibatan masyarakat petani hutan, nyatanya memang pada level terbawah, baik dari segi program maupun dari segi administratif Perum Perhutani. Mereka baru dilibatkan setelah rencana proyek PS disusun pada satu daerah kawasan hutan yang dikontrol oleh KRPH.

Mula-mula KRPH pergi ke Lurah memberitahukan bahwa Perum Perhutani setempat akan membuka proyek PS di petak hutan tertentu dekat desa tersebut, dan menawarkan kalau ada penduduk desa yang mau ikut dalam proyek tersebut. Nampak pendekatan ini lebih bersifat formal alih-alih mengajak peranserta pejabat desa, bahwa

segala sesuatu yang menyangkut penduduk suatu desa harus dilakukan melalui "pintu" kantor desa. Pihak kantor desa sendiri nampaknya kurang bergairah melibatkan diri dengan proyek ini, namun juga tidak menghalangi Perum Perhutani mengajak rakyat desa dalam PS. Kekurang-gairahan ini disebabkan karena beberapa hal :

- a. Desa tidak tahu bagaimana bentuk keterlibatannya
- b. Hubungan yang kurang harmonis antara pejabat desa dengan pegawai Perum Perhutani
- c. Proyek PS tidak menguntungkan para pejabat
- d. Pejabat desa kurang perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Setelah itu Asper atau KRPH bersama Mandor yang kawasannya akan dijadikan lokasi proyek PS pergi mencari seorang yang tempatnya biasanya dijadikan tempat pertemuan petani hutan. Di tempat penelitian saya, orang tersebut adalah tengkulak pisang, yaitu orang yang menampung pisang yang dibawa turun dari ladang. Mungkin tengkulak pisang inilah yang disebut sebagai "pemrakarsa" dalam buku P4S. Di muka ketua RT, sang tengkulak pisang dan beberapa orang terkemuka, pejabat Perum Perhutani mengumumkan rencana proyek PS yang akan dibuka di dekat daerah tersebut. Kepada penduduk desa yang hadir diminta untuk menyebarkan berita ini kepada yang lain dan siapa yang tertarik silahkan datang untuk mendaftar ke tempat ini pada tanggal yang telah ditetapkan. Tahap ini disebut sebagai inventarisasi calon anggota KTH. Dari sekian penduduk desa yang mendaftar, sebagian dipilih berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Ini adalah tahap seleksi anggota.

Pada tahun 1986 terpilih 53 anggota KTH, yang dikelompokkan ke dalam 4 Sub KTH. Ketua KTH adalah salah seorang tengkulak pisang yang menjadi pemrakarsa. Tahun 1987 tidak ada proyek PS di daerah penelitian saya. Dalam proyek PS tahun 1988 terpilih 58 petani yang dikelompokkan ke dalam 5 Sub KTH, ketuanya adalah salah seorang Ketua RW desa lembahsari. Tahun 1989 terpilih 60 petani, yang dibagi menjadi 5 Sub KTH, yang ketuanya adalah salah seorang bekas Polisi Desa Cirameuwah Girang yang sudah lama bekerjasama dengan Perum Perhutani mengelola hutan. Ini semua adalah tahap pembentukan organisasi KTH. Setelah itu dibuat "Surat perjanjian kontak pembuatan tanaman". Surat ini dipengaruhi judul dan redaksinya pada setiap pembukaan proyek PS yang baru.

Setelah semua pekerjaan persiapan lapangan lahan yang direncanakan untuk proyek PS (sket map, memancang pal batas, pembuatan jalan ronda, pembagian andil) diselesaikan oleh petugas Perum Perhutani, maka pesanggem mulai membuka dan menggarap lahan andil masing-masing. Disinilah baru mulai terlihat peranserta nyata para pesanggem. Sebelum petani ngaseuk pare (menanam benih padi), PPL pertanian atas permintaan Perum Perhutani memberikan penyuluhan tentang jenis tanaman dan cara bertahan kepada petani. Inilah baru mulai terlihat keterlibatan instansi terkait. Nampaknya pihak PPL pertanian tidak memberikan jasanya dengan

gratis. Untuk PS tahun 1986 Perum Perhutani telah menetapkan jenis benih padi yang harus ditanam pesanggem dan benih ini harus dibeli dari Perum Perhutani.

Pembinaan Organisasi KTH

Lahan pesanggem dikontrol oleh seorang mandor Perum Perhutani sekitar 3 hari dalam seminggu. Dia mengontrol cara petani bertanam dan mengolah tanah, perhatian ditujukan terutama kepada tanaman jati dan kebersihan lahan. Tanaman jati yang mati atau tidak jadi segera disuruh sulam. Petani yang kurang rajin sehingga lahannya penuh rumput dan semak dan yang menanam di luar batas yang ditentukan akan ditegur. Ancaman kadang-kadang dikeluarkan bagi yang bandel, lahannya akan diambil kembali oleh Perum Perhutani. Ancaman ini nampaknyatidak menggetarkan petani karena beberapa lahan yang ditinggal tidak terurus nyatanya tidak diambil Perum Perhutani tapi diteruskan oleh pesanggem lain berdasarkan persetujuan informal antara kedua belah pihak.

Sementara itu pihak pengontrol juga mengeluarkan pernyataan yang memberi harapan bahwa petani yang benih jatinya tumbuh hidup diatas 80 % akan diberi hadiah. Sampai kini hadiah harapan ini belum diberikan juga. Hal ini menimbulkan keluhan di kalangan pesanggem; Perum Perhutani cuma umbar janji kosong.

Kontrol, nasihat dan pernyataan terhadap pesanggem kadang-kadang juga dilakukan oleh Asper, KRPH, petugas Bina Swadaya dan mantri dari Cianjur. Tapi kontrol seperti ini hanya pada proyek 1986, mulai proyek 1988 tinggal Mandor sendiri yang masih kelihatan batang hidungnya di gunung, yang lain sudah sangat jarang. Hal ini memberikan kesan pada petani bahwa proyek ini hanya permulaan saja yang sangat diperhatikan, "hangat-hangat tahi ayam".

Disamping izin bertani di tanah hutan Perum Perhutani dan penyuluhan pertanian, pesanggem juga mendapat bantuan pinjaman bibit, pupuk dan obat dari Perum Perhutani. Pinjaman ini harus dibayar setelah panen. Bibit dibayar kembali 100 % menurut harga toko, pupuk dibayar kembali 70 % dan obat tidak jelas pembayarannya oleh pesanggem. Sementara itu bibit buah-buahan, kunir, kapul dan kopi diperoleh secara gratis. Tidak semua pesanggem memanfaatkan pinjaman ini. Pada musim tanam I tahun 1986 semua petani menggunakan bibit padi dari Perum Perhutani. tapi setelah diketahui bahwa panen dengan bibit ini sangat jelek, banyak yang hapak, petani lalu beralih ke bibit padi huma yang mereka dapat dari kampung. Bibit ini juga digunakan untuk musim tanam 1987 dan 1988.

Untuk tanaman tahun 1989 Perhutani ingin agar pesanggem mananam benih IR 64, mengingat benih ini berhasil baik di proyek PS Indramayu. Keinginan ini diinstruksikan kepada KRPH dan Mandor agar dilaksanakan. Namun instruksi ADM Cianjur ini tidak terlaksana sepenuhnya karena:

- a. instruksi keluar terlambat, sebagian petani telah ngaseuk

1. sebagian besar petani, kalau tidak seluruhnya, belum percaya akan hasil IR 64 untuk lahan kering, takut panen gagal
2. benih harus dibayar kembali 100 % sesuai dengan harga toko (Rp 600 per kg). Sementara itu petani sudah punya benih sendiri yang tidak perlu dibeli dan kalau dibelipun harganya lebih murah.

Pupuk memang digunakan oleh seluruh petani, kecuali seorang, namun hanya digunakan untuk musim pertama dan porsinya jauh dari mencukupi rata-rata 80 kg per ha. Faktor penyebabnya antara lain:

- a. petani itu miskin, tidak mampu membeli pupuk
- b. hasil panen hanya sedikit, takut tidak bisa bayar harga pupuk
- c. yang digarap adalah lahan milik "orang lain", kalau dipupuk berarti menguntungkan "orang lain" itu, lahan ini cuma akan dipakai selama 2 tahun saja.
- d. tidak mau tahu cara/ takaran penggunaan pupuk.

Tentang penggunaan obat insektisida, tidak banyak informasi yang diperoleh dari pesanggem. Tidak ada pesanggem yang memberi obat secara individual untuk ladang masing-masing. Ada informasi yang mengatakan bahwa insektisida diberikan serentak untuk seluruh lahan proyek oleh ketua-ketua SubKTH. Namun informasi ini belum jelas kebenarannya. Pada umumnya petani bersedia memberi pupuk menurut takaran dan menyemprot tanaman dengan insektisida, kalau kedua sarana ini diberikan gratis.

Ada tiga jenis rapat KTH : rapat KTH, rapat sub KTH dan rapat proyek (antara petugas perhutani dan ketua-ketua SubKTH). Rapat KTH hanya rajin dilakukan pada proyek 1986. Dalam setahun dapat terjadi 12 kali. Pada proyek 1988 rapat sangat jarang, mungkin cuma 3 atau 4 kali dalam setahun. Rapat SubKTH sama sekali tidak pernah, sedangkan dengan petugas Perhutani 3-4 kali dalam setahun. Rapat KTH diselenggarakan di "gubuk kerja" di gunung, sedangkan dengan Perhutani diselenggarakan di "Kopel" (kantor Asper dan KRPH).

Perbedaan frekwensi rapat antara proyek 1986 dan 1988 terutama terjadi karena kondisi ketua KTH. Ketua KTH 1986, meskipun buta huruf tetapi dinamis, kreatif, punya wawasan luas terhadap seluruh anggota KTH, punya perhatian untuk kemajuan bersama dan pandai. Beliau adalah juga ketua RT 20 Desa Lembahsari. Ketua KTH 1988 terutama kurang mempunyai wawasan terhadap kesejahteraan anggota dan yang lebih parah lagi, mempunyai pekerjaan tetap sebagai juru parkir di kota Cianjur. Beliau hanya pulang beberapa kali dalam sebulan ke kampung. Disamping itu beliau juga menjabat sebagai ketua RW 4 Desa Lembahsari. Banyak pihak yang mengeluh karena kurangnya perhatian ketua KTH terhadap anggota. Tahun 1989 yang lalu jabatan ketua RW sudah terlepas dari tangannya karena alasan di atas.

Dalam rapat KTH dibicarakan perkembangan kerja petani, cara kerja dan jenis tanaman. Dalam rapat dengan petugas Perhutani

dibicarakan: evaluasi umum oleh Perhutani, intruksi dari Perhutani, beberapa "omelan" tentang cara kerja petani yang malas, lalai dan bodoh. Dalam rapat dengan Perhutani terlihat jarak sosial antara "pemilik tanah, pejabat, pemegang otoritas" dan petani yang bodoh, miskin dan numpang hidup di lahan Perhutani.

Status Sosial dan Ekonomi Pesanggem

Petani hutan yang mengikuti proyek PS di Kiara Payung sebagian besar berasal dari Kampung Cijambe Desa Lembahsari dan Kampung Cirateum Desa Ciramaeuwah Girang. Pada proyek PS 1988 mulai disertakan pengikut yang lebih jauh. Saya tidak dapat melakukan sensus terhadap semua KTH, karena daftar anggota KTH 1986 yang diperoleh dari papan pengumuman di Gubuk Kerja (di kantor KRPH filenya tidak ditemukan lagi) tidak sesuai lagi dengan kenyataan: banyak anggota KTH yang sudah mengundurkan diri dan lahannya dikerjakan oleh petani lain tanpa setahu Perhutani dan nama KTH tidak sesuai dengan alamat dan umurnya. Kedua, anggota KTH 1988 dan 1989 tinggal sangat berjauhan dan berpencairan, susah untuk mendatangi semua.

Dari seluruh 157 kepala keluarga Kampung Cijambe dan Kampung Cirateun yang saya sensus, 55 KK (35 %) ikut proyek PS di Kiara Payung. Beberapa ciri-ciri sosial dan ekonomi mereka adalah sebagai berikut. Sebagian tidak bisa membaca dan secara umum tingkat pendidikan mereka sangat rendah: 30 % tidak sekolah, 45 % tidak tamat SD dan hanya 25 % yang tamat SD. Kondisi ekonomi sangat rendah. Hampir semua (90 %) tidak mempunyai lahan pertanian dan pekerjaan. Pendapatan harian hanya cukup untuk makan nasi dengan ikan asin selama beberapa hari dalam seminggu hanya 5 % yang makan dengan ikan asin setiap hari, 50 % lainnya 15 hari dalam sebulan, selebihnya antara seminggu sampai 3 hari dalam sebulan. Hari-hari lain berlalu dengan nasi dan uyah, "sampai lidah rasanya jadi pahit", kata Pak Haji Dasuki kepala Dusun Cijambe. Pakaian mereka sudah sampai belel, entah berapa tahun sekali dapat berganti dengan yang baru. Semua rumah terbuat dari gubuk bambu dan kayu, hanya 10 % yang semi permanen (semen campur kayu-bambu), rata-rata berukuran 6 x 4 meter (24 meter persegi). Mereka ikut proyek PS karena tidak punya lahan pertanian dan pekerjaan.

Bagian dari masyarakat ini sudah biasa dipandang miskin, bodoh dan juga sudah terbiasa diperintah bahkan diperas oleh pihak penguasa kalau tidak duitnya yah hasil buminya, tentu dengan cara yang sesopan orang Cianjur. Baik dalam kehidupan rutin maupun dalam upaya pembangunan, mereka adalah kaum dependent. Dengan keadaan yang seperti ini, peranserta seperti apakah yang diharapkan dari mereka dalam PS, kecuali melanjutkan peranan dependensi mereka yang diperintah, yang diatur, yang mendapat bantuan dari pemerintah melalui pejabat desa.

Pengetahuan orang desa (local knowledge) tentang pertanian dan lingkungan alam sekitar seringkali dikagumi oleh para Antropolog Barat, tapi tidak untuk pengetahuan para ahli pengetahuan kita. Mereka memang dari semula, bahkan dari nenek moyang yang

tidak mereka ketahui lagi, sudah bertani. Tapi pengetahuan mereka tentang sistem pertanian : tanah, iklim, pola curah hujan, jenis tanaman yang menguntungkan dan cara bertanam yang efisien dan efektif tidak mengendap ke dalam otak secara kritis, untuk kemudian diproses menjadi "teori lokal". Sebagian besar pengalaman itu hilang saja dalam kerutinan hidup yang miskin dan lelah, penakut dan kurang inisiatif. Apalagi tentang pengalaman-pengalaman di dunia lain dan sistem baru yang dikembangkan dari luar, jauh dari jangkauan hidup mereka sehari-hari dan pola berpikir mereka. Penyuluhan pertanian, meskipun giat dilancarkan, hanya menyentuh bagian yang paling dangkal dan partial dari pola perilaku dan budaya petani kita itu. Apakah ini mempunyai hubungan dengan nilai kultural Orang Sunda Cianjur "nyaah dulang" ? Ini masih bergeliga dalam otak saya.

Mereka mulai bertanam setelah cukup hujan. Tapi bulan apa hujan turun, bulan apa musim kering, mereka kurang paham polanya. Bahkan Kaur Pembangunan Desa merasa heran dan beruntung ketika saya beri fotokopi pola curah hujan di Cikalong Kulon yang saya peroleh dari buku Programa Penyuluhan Pertanian. Hampir semua petani tidak dapat menyebutkan secara lengkap dan berturut nama bulan "RI", apalagi hubungan antara bulan-bulan tersebut dengan pola hujan. Sehingga masih banyak saja petani yang menuai padi padi di sawah tadah hujan pada saat yang semestinya bertanam (November dan Desember). Hasil-hasil tuaian mereka tentu saja miskin. Inilah salah satu dari beberapa indikator tentang lemahnya pengetahuan mereka tentang sistem pertanian.

PS dapat dipandang sebagai satu sistem pertanian baru yang diperkenalkan oleh Perum Perhutani kepada petani hutan, meskipun bertani di hutan sudah biasa mereka lakukan. Sampai seberapa jauh para pesanggem tahu unsur-unsur program PS ? Semua pesanggem, kecuali seorang, tahu bahwa tanaman pokok di tempat mereka adalah jati, tapi jenis tanaman yang lain tidak banyak yang tahu. Hanya 55 % pesanggem yang tahu bahwa tanaman pagar adalah kopi dan nenas, 32 % yang tahu bahwa tanaman sisipan adalah pisang dan buah-buahan (jambu, petai dan kadu), 10 % yang tahu bahwa tanaman sela adalah vilosa, hanya 7 % yang tahu bahwa tanaman pengisi adalah padi dan palawija dan tidak ada yang tahu nama tanaman tepi, meskipun 95 % pesanggem mengatakan bahwa mereka menerima cukup petunjuk dari Perhutani.

Petani tidak mampu membuat kalkulasi terhadap hasil usahatani mereka. Jika semua faktor produksi diperhitungkan maka usahatani PS adalah rugi. Namun petani tidak pernah atau masa-bodo terhadap faktor tenaga kerja. Padahal faktor ini merupakan bagian yang terbesar. Hanya 25 % yang menyadari hal ini, selebihnya bilang "pada-pada" tidak untung tidak rugi, bahkan ada 10 % yang merasa untung. Mereka yang terakhir ini, saya kira realistis. Kalau sudah tahu rugi lalu mengapa terus ikut PS ? "Dari pada menganggur", jawab mereka. Bekerja, meskipun dengan hasil rugi atau pada-pada adalah lebih "terhormat" dari pada menganggur. Lagi pula 90 % petani melakukan PS hanyalah sebagai pekerjaan tambahan di damping pekerjaan lain seperti buruh tani, menyadap karet, berdagang atau ke sawah.

Pesanggem tidak tahu secara pasti berapa kali rapat KTH dan rapat dengan Perhutani pada tahun ini. Ada yang mengatakan tidak pernah, tapi adapula yang mengatakan 48 kali. Padahal dalam tahun 1988 rapat KTH dan rapat dengan Perhutani masing-masing hanya 3-4 kali saja. Hanya 10 % pesanggem yang tahu fakta ini. Seterusnya, apa guna hutan ? 90 % pesanggem mengatakan bahwa hutan adalah untuk ditanami dengan tanaman yang perlu bagi kebutuhan hidup penduduk desa (cq padi, palawija). Mereka tidak dapat membedakan antara "keinginan" (*the will*) dan "yang seharusnya" (*the norm*).

Penggarapan Lahan

Penanaman dan pemeliharaan tanaman pokok (jati) nampaknya berhasil dengan baik, berkat kontrol Mandor dan kepatuhan petani. Begitu juga tanaman vilosa untuk menjaga erosi dan kesuburan jati. Tanaman pengisi terdiri dari padi dan palawija. Padi ditanam sekali setahun pada bulan Oktober/November. Pada proyek PS 1986 petani menerima bibit padi yang sudah ditetapkan oleh Perhutani, namun hasilnya mengecewakan, sekitar 50 % hapak. Petani menyalahkan benih yang tidak sesuai dengan tanah. Dinas Pertanian dan Perhutani menyalahkan angin yang terlampau kencang di gunung. Tahun 1987 dan 1988 petani menggunakan benih padi huma dari kampung yang dicari sendiri. Ini lebih berhasil dan tidak ada keluhan dari petani. Tahun 1989 Perhutani "menginstruksikan" agar menggunakan benih IR 64.

Tanaman palawija terdiri atas jagung (ditanam oleh seluruh pesanggem), kacang tanah (40 %), cengek (20 %) dan beberapa gelintir ada juga yang menanam kacang hijau, kacang kedelai, singkong, hiris, rowai, kacang panjang, ketimun dan labu. Palawija ditanam bersama padi pada musim tanam I. Pada musim tanam II petani biasanya hanya bertanam jagung, sebagian kecil ada juga yang mengkombinasikannya dengan kacang tanah. Sementara itu cengek dibiarkan tumbuh sepanjang tahun. Jadi padi dan jagung adalah 2 jenis tanaman pokok disini. Untuk sehari-hari orang makan padi (nasi) dan untuk selingan adalah jagung dan singkong. Dengan demikian tanaman pokok = tanaman subsistens. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani yang "maju", kacang tanah katanya lebih menguntungkan dari pada padi dan jagung. Tapi petani lebih berorientasi "subsistens" dari pada "pasar", karena itu mereka kukuh bertahan pada tanaman padi dan jagung. Alasan mereka, "padi jadi nasi dan dapat terus dimakan. Kacang-kacangan jadi uang. Untuk makan kita harus beli beras lagi di pasar". Sementara itu, membeli beras berarti menurunkan derajat petani. Ini adalah tanda ketidakmampuan, ketidakberadaan, dus status sosial.

Petani mengerjakan lahan mereka berpasangan suami-istri, kadang-kadang dibantu oleh anak pada mereka yang punya anak cukup besar. Menanam (ngaseuk) dilakukan secara gotong royong sesama tetangga, tanpa upah, cuma diberi makan gulai ayam dan kolak tepung. Panen dilakukan bersama tetangga atau dengan menantu

anak, dengan bagi hasil 5 : 1. Petani yang mempunyai lahan luas mengupahkan sebagian pekerjaan, khususnya macul dan ngoyos.

Dari semua anggota KTH angkatan 1986 dan 1988, masing-masing hanya 10 % orang yang tidak dapat andil tambahan pada proyek PS tahun berikutnya : 40 % dapat andil pada setiap proyek PS (1986-1988-1989), 15 % dapat andil pada tahun 1986 dan 1989 dan 25 % dapat andil pada tahun 1988 dan 1989. Nampaknya dalam memilih calon KTH, Perhutani mengambil jalan selamat dengan memberi kesempatan kepada KTH lama yang mempunyai reputasi baik untuk mendapat andil baru pada proyek PS berikutnya. Sampai seberapa jauh cara ini mengganggu prinsip "pemerataan", tidak saya teliti. Rata-rata luas andil pesanggem 1986 dan 1988 adalah 1.26 ha dengan range antara 0,25 - 3.50 ha.

Petani 1986 juga telah menanam pohon buah-buahan (jambu, petai, durian) di lahan mereka. Mereka juga menanam nenas, pisang, kapulaga dan kunir. Sebagian dari mereka sudah ada yang menuai hasil jambu. Namun hasilnya kurang memuaskan. Pertama, jambu tersebut tidak sebesar seperti yang diharapkan. Kedua, sebagian jambu diserang hama "pencuri". Petai, durian dan kapulaga masih belum menghasilkan. Pisang sudah beberapa kali diambil, tapi kini mati diserang hama "muntaber". Pisang adalah tanaman penting yang mengikat pesanggem dengan lahannya, karena berbuah sepanjang masa. Tanpa pisang atau tanaman yang mempunyai karakter ekonomi yang sama, maka jangan diharap pesanggem akan "melihat" lagi lahannya mulai tahun ke 3. Hampir semua lahan 1986 telah dipirak (ditinggalkan) oleh petani, kecuali 4 orang yang masih punya secercah harapan yang mencoba menanam padi pada tahun 1988, tapi hasilnya mengecewakan, sehingga akhirnya terpaksa dipirak juga. Semua lahan 1986 kini penuh semak belukar dan rumput liar (bala).

KESIMPULAN DAN SARAN.

Peranserta Masyarakat

Dari uraian di atas rasanya kita sudah dapat mendefinisikan apa yang disebut sebagai "masyarakat" dalam program PS di Kiara Payung dan di mana serta bagaimana bentuk peranserta mereka. Masyarakat adalah penduduk desa yang tinggal di daerah sisi (dekat hutan), yang merupakan segment yang paling miskin dan kurang terdidik dan tidak punya lahan atau pekerjaan. Mereka terlibat sebagai pesanggem di bawah satu perjanjian/kontrak kerja di lahan Perhutani, yang berada di bawah kontrol langsung seorang KRPH, yang kontrol ini dilaksanakan di lapangan oleh seorang mandor.

Definisi di atas sekaligus menyiratkan bentuk hubungan segi tiga : pesanggem - Perhutani - lahan. Perhutani dan pesanggem adalah 2 subjek yang melakukan hubungan kerjasama dan lahan adalah sebagai objek yang mengikat hubungan kedua pihak ini.

Sederhananya, Perhutani adalah "pemilik lahan " dan pesanggem adalah "penggarap lahan". Bagaimana bentuk hubungan kerjasama, bagaimana cara menjaga dan menggarap lahan dan apa yang dihasilkan oleh lahan, bagaiian yang mana dari lahan yang berhak dinikmati oleh masing-masing pihak dinyatakan dalam sebuah surat perjanjian. Terwujudnya dan maju-mundurnya peranserta pesanggem dalam proyek PS tergantung kepada perkembangan kondisi-kondisi hubungan kerjasama ini.

Saya tidak melihat kesalahan dalam kenyataan bahwa peranserta masyarakat pada "level administrasi" RPH. Ini adalah tepat pada masa kini, karena KRPH bersama Mandor-mandor adalah petugas Perhutani yang langsung terlibat dengan hutan dan masyarakat desa. Sementara itu masyarakat terlibat secara individual. Mereka tidak mempunyai organisasi yang baik pada tingkat desa, apalagi di atas level desa. Organisasi dibentuk setelah mereka berperanserta.

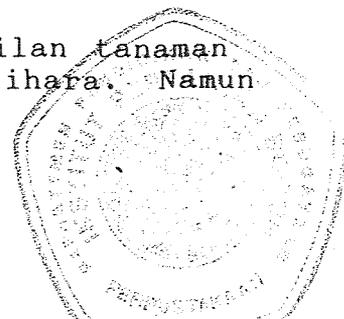
Masyarakat desa sebagai pihak yang didorong untuk terlibat adalah begitu rendah kondisi sosial dan ekonominya. Dalam aspek program, melibatkan mereka pada berbagai level, nampak akan membuang waktu dan sia-sia saja. Keterlibatan mereka lebih tepat pada level evaluasi. Masukan dari mereka perlu untuk kesempurnaan program.

Pada level proyek, masyarakat dan instansi terkait mestinya dapat berperanserta lebih besar. Dalam memilih petak hutan yang akan dijadikan lahan proyek, misalnya, pendapat masyarakat perlu dipertimbangkan, bahkan instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Kantor Desa sudah perlu dilibatkan. Keputusan dapat diambil bersama mereka, sehingga kalau terjadi kesalahan dalam memilih petak proyek yang berakibat negatif terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial desa, akan ditanggung bersama.

Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pembagian lahan andil sehingga pembagian benar-benar adil. Kekecewaan karena tidak adil dalam pembagian andil dapat merusak hubungan Perhutani dengan pesanggem tersebut. Penggarapan dan penjagaan lahan andil memang sepenuhnya diserahkan kepada pesanggem. Namun ini tidak berarti Perhutani dapat berlepas tangan. Yang terlibat selama ini adalah pesanggem sebagai penggarap dan Perhutani sebagai penjaga. Bagaimana meningkatkan peranserta pesanggem sebagai "penjaga" lahan hutan ?. Ini menyangkut berbagai faktor antara lain "sense of belonging" petani terhadap hutan.

Dari segi menikmati hasil hutan, pesanggem nampaknya masih kurang diuntungkan. Mereka cuma dapat memanfaatkan lahan secara maksimal selama 2 tahun. Setelah itu praktis tidak ada hubungan lagi dengan lahan tersebut, kecuali kalau mereka punya tanaman jangka panjang yang memproduksi secara kontinu disana. Selama ini mereka bertanam pisang tapi sekarang pada mati. Mereka usul tanam kopi.

Pesanggem merasa telah berjasa dalam keberhasilan tanaman pokok (jati, mahoni, dll), dari menanam sampai memelihara. Namun



mereka tidak berperanserta sedikitpun dalam menikmati hasil jenis tanaman ini. Banyak pesanggem diam-diam merasa iri hati. Diam-diam mereka menuntut "uang ajir" atau "hadiah uang" dari Perhutani. Sementara itu "uang guludan" dibagikan kurang adil dan kurang memadai jumlahnya.

Proyek PS telah menghabiskan sumber kayu bakar masyarakat. Tanaman vilosa terlalu lambat tumbuh besar. Kalau dibiarkan terus begini bisa berakibat negatif terhadap tanaman pokok. Dapatkah satu jenis tanaman kayu bakar yang baik dimasukkan kedalam daftar tanaman yang harus ditanam pada andil masing-masing pesanggem? (Mukhoti, 1986). Ini juga dapat merupakan salah satu daya tarik agar pesanggem tetap punya kontak dengan andilnya setelah tahun ke 2.

Pelembagaan Perhutanan Sosial

Kini tentang legitimasi PS. Apakah masyarakat pesanggem sudah percaya bahwa PS (cq Perhutani) memang melayani kepentingan mereka? Perhutani telah meminjamkan lahan, membantu fasilitas saprotan, memberi penyuluhan. Ini semua dirasakan oleh pesanggem. Tapi mereka juga sadar bahwa semua ini tidak diberikan dengan gratis. Ini dibayar dengan tenaga kerja pesanggem dalam memetak tanah, menanam dan memelihara jati. Meskipun secara diam-diam mereka menuntut uang memetak tanah, menanam dan memelihara jati, namun tuntutan ini tidak terlalu keras, karena beratnya masalah tidak punya pecabakan (tanah dan kerja).

Patut dicatat oleh Perhutani bahwa adat setempat tidak mengenal sistem bagi hasil dan sistem sewa di lahan kering, baik di sawah maupun di ladang. Petani yang bertanam palawija di sawah atau di ladang orang lain tidak berkewajiban memberi sewa atau membagi hasil dengan pemilik tanah. Jadi dalam hal ini Perhutani tidak berhak meminta balas jasa "tenaga kerja" pesanggem untuk menanam dan memelihara jati sebagai imbalan terhadap penggunaan tanah hutan. Apalagi pengutipan sebagian hasil garapan petani oleh Mandor. Kalau mereka memberikan, karena keadaan yang tidak merelakan, maka di dalam hati mereka mendumel dan ini akan merusak peranserta masyarakat.

Sementara itu fasilitas pupuk dan obat yang harus dibayar kembali 70 % dari harga pasar dirasakan petani masih terlalu tinggi dan kurang membantu. Menurut mereka pupuk dan obat juga berguna untuk tanaman pokok. Bantuan yang lebih besar perlu difikirkan, misalnya dikurangi menjadi 50 % atau 25 %.

Apakah PS telah memperbaiki nasib petani? Benar, tapi baru pada tahap yang paling dasar, yaitu memberi mereka pecabakan. Hasil dari pecabakan ini masih jauh dari mensejahterakan mereka. Usahatani mereka rugi tapi karena faktor tenaga kerja tidak dihitung maka kerugian dimasa-bodokan saja. Perlu difikirkan hasil usahatani pesanggem.

Kini tentang peranan petani dan Perhutani dalam PS. Nampaknya kedua belah pihak belum mencapai pengertian yang mantap tentang peranan yang diharapkan pada masing-masing pihak dalam PS. Faktor sejarah yang menempatkan rakyat sebagai kaula, konteks administrasi Indonesia dimana petugas lebih minta dilayani dari pada melayani masyarakat dan latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah, maka petugas Perhutani masih mempunyai persepsi peranan sebagai "pengontrol", "pemilik lahan", "pemberi bantuan", sementara itu petani adalah "pesanggem", "yang diperintah", "yang dikontrol" dan "yang dibantu". Tidak ada pola hubungan mitra sejajar. Idealnya masyarakat itu bukanlah kelompok target, bukan "yang terkena dampak", tapi adalah mereka yang akan meraih manfaat, the beneficiaries (Uphoff, 1985). Mereka bukan pesanggem tapi mitra sejajar. Ada 3 hal yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Pertama, definisi mitra sejajar harus lebih jelas dirumuskan dan disebarluaskan. Kedua, petugas Perhutani harus lebih merendahkan hatinya, sebaliknya petani harus diberi kesempatan untuk mengangkat harga dirinya. Siapa yang harus memulai dan bagaimana memulainya ?

Komitmen yang lebih besar dari Petugas Perhutani terhadap tujuan PS masih perlu ditingkatkan. Memotong bantuan untuk petani dan mengutip sebagian hasil petani, seperti yang masih terlihat disana-sini sampai kini, adalah melawan arus tujuan PS. Ingat bahwa petani itu adalah the beneficiaries. Ini perlu ditertibkan.

Pengembangan organisasi KTH perlu ditingkatkan terutama dari segi administrasi, rapat dan file. Ini merupakan tugas petani dan Perhutani. Hubungan dengan organisasi terkait masih belum lancar. Nampaknya saling kecurigaan antara instansi cukup besar. Sebuah proyek berarti "kebanjiran" bagi petugas proyek dan instansi yang bersangkutan. Sehingga meminta peranserta instansi yang lain berarti berbagi "kebanjiran" dengan instansi tersebut. Konstren ini berada di luar kuasa kita. Ini kultur administrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Brokensha, David. 1984. "Sosial and Community Forestry, part II", dalam IDE, Development Anthropology Network, Bulletin of the Institute of Development Anthropology, Vol. 2, Nos. 1 and 2, May 1984.
- Eaton, Joseph W. 1986. Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi (terjemahan). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Esman, Milton J. dan Hans C. Blaise. 1966. Institution Building Research: The Guiding Concepts. Mimeo.
- Esman, Milton J. 1967. The Institution Building Concepts: An Interim Appraisal. Mimeo.

- Manurung, E. G. Togu. 1989. "Analisa Biaya-Manfaat Pilot Perhutanan Sosial dan Optimalisasi Usahatani Tumpang Sari di Resort Polisi Hutan (RPH) Kiara Payung KPH Cianjur, Jawa Barat". Tesis S2 Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Murray, Gerald F. 1987. "The Domestication of Wood in Haiti: A Case Study in Applied Evolution" dalam Robert M. Wulf and Shirley J. Fiske (eds.), Anthropological Praxis: Translating Knowledge into Action. Boulder. Westview Press.
- Mukhoti, Bela. 1986. "Forestry Project and Landless Farmers: A view of Issues from Within a Donor Agency", dalam Culture and Agriculture No. 30.
- Noronha, Raymond dan John S. Spears. 1985. "Sociological Variables in Forestry Project Design" dalam Michael Cernea, ed. Putting People First. Oxford University Press. Published for the World Bank.
- Perum Perhutani. 1988. Pedoman Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Perum Perhutani. 1989. Pedoman Perencanaan Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Thomas, D. Woods et al. 1972. Institution Building: A Model for Applied Social Change. Cambridge, Mass.: Schenkman Publishing Company.
- Thorsen, Thomas W. 1986. "Model Pembangunan Lembaga dalam Pelaksanaan dan Peninjauan Program", dalam Joseph W. Eaton (ed.). Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep Ke Aplikasi (terjemahan). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Uphoff, Norman T. dan Milton J. Esman. 1974. Local Organization for Rural Development: Analysis of Asian Experience (Mimeo). Rural Development Community. Centre for International Studies. Cornell University. Ithaca. New York.
- Uphoff, Norman T. 1985. "Fitting Project to People", dalam Michael Cernea (ed.), Putting People First. Oxford University Press. Published for the World Bank.